

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, informasi memegang peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Setiap instansi, khususnya penyelenggara negara dan badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan atau memberikan informasi kepada masyarakat. Kewajiban tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa, badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau, menerbitkan informasi dan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya keterbukaan informasi publik ini, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memperoleh data yang valid serta mendorong peningkatan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai instansi maupun lainnya.

Salah satu bentuk keterbukaan informasi di bidang hukum, yakni melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Sejak tahun 2022, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah telah menjadi wadah pendayagunaan bersama atas dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Melalui layanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat, JDIH bertujuan membangun sistem dokumentasi hukum yang terintegrasi di berbagai instansi pemerintah, menjamin ketersediaan informasi hukum yang komprehensif, serta memperkuat kerja sama antaranggota jaringan dalam menyediakan informasi hukum.

Untuk mendukung kemudahan akses informasi hukum kepada masyarakat, JDIH menyediakan berbagai produk hukum yang dapat diakses secara *offline* melalui perpustakaan dalam bentuk cetak, maupun secara *online* melalui situs web resmi JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Hal ini memungkinkan seluruh elemen masyarakat untuk mengakses informasi hukum dengan mudah dan cepat.

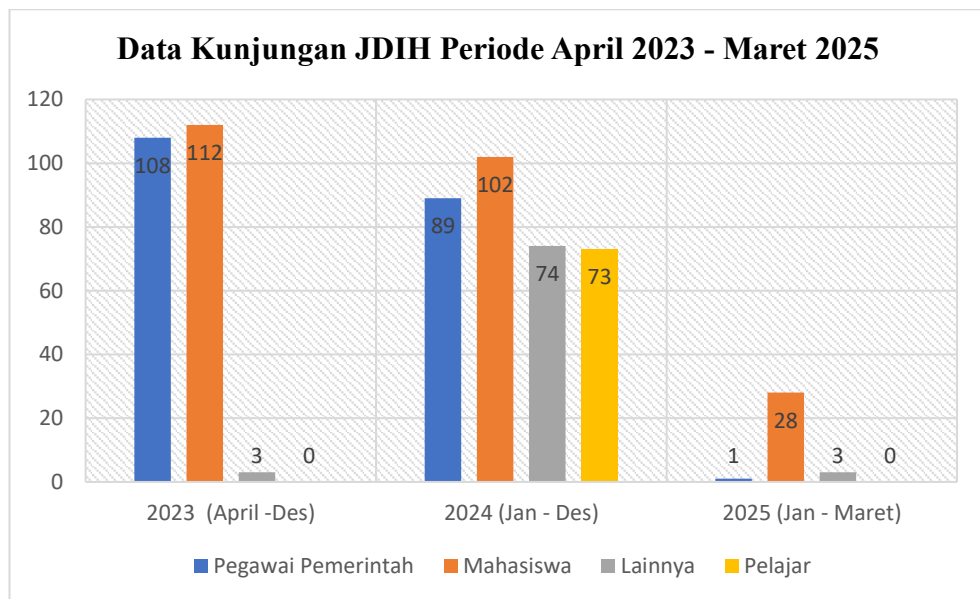
Di era saat ini masyarakat, khususnya generasi muda, lebih banyak menggunakan internet atau media digital untuk memenuhi kebutuhan informasi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh GoodStats (2024), mayoritas anak muda 17-25 tahun menggunakan internet atau media digital seperti media sosial (91,2%) dan situs web (62,2%) sebagai sumber utama informasi, jauh dibandingkan dengan media konvensional seperti televisi (29,1%) dan radio (4%). Penelitian oleh Savolainen (2017) juga menyebutkan bahwa perilaku individu dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi ini dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan teknologi, hal ini juga berlaku bagi pelajar dan mahasiswa, yang kini lebih memilih media digital seperti jurnal ilmiah, perpustakaan digital, situs web resmi institusi, dan media sosial untuk memenuhi kebutuhan informasi akademik secara cepat dan efisien.

Keberadaan JDIH sebagai penyedia sumber informasi hukum, khususnya secara digital, yang kredibel menjadi sangat relevan dan penting. Melalui JDIH, masyarakat bisa dengan mudah menemukan dokumen hukum seperti Peraturan Daerah, Peraturan DPRD, serta Keputusan pimpinan DPRD. Dengan adanya akses yang cepat dan terbuka ini, tentunya dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan memahami hukum maupun aturan yang berlaku.

Untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya informasi hukum, JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah terus berupaya melakukan beberapa program. Program tersebut di antaranya yaitu sosialisasi, berpartisipasi dalam pameran (*expo*), dan membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk mengunjungi kantor JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, mulai tahun 2024 JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah menginisiasi program "*Goes to Parliament Modern*", program ini merupakan kegiatan sosialisasi yang ditujukan khusus untuk pelajar dan mahasiswa yang berkunjung ke kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah. Program *Goes to Parliament Modern* ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada pelajar dan mahasiswa

mengenai peran dan fungsi parlemen dalam proses legislasi serta pentingnya akses terhadap informasi hukum melalui JDIH.

Berikut merupakan data kunjungan masyarakat (mahasiswa, pelajar, pegawai pemerintah, dan lainnya) ke JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah periode April 2023 – Maret 2025:



Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Kunjungan ke JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode April 2023 – Maret 2025 (Dokumen Pribadi JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2025)

Berdasarkan Gambar 1.1 grafik di atas, jumlah kunjungan JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah periode April 2023 – Maret 2025, terlihat adanya peningkatan signifikan pada tahun 2024. Jumlah kunjungan naik dari 223 orang pada periode April – Desember 2023 menjadi 337 orang pada tahun 2024. Adapun kunjungannya sendiri didominasi oleh mahasiswa dan pegawai pemerintah, seperti Humas DPRD Jawa Tengah, Persidangan, PJ Bupati/Wali Kota, Anggota DPRD, Inspektorat, dan lain-lain. Pada tahun 2024 juga tercatat adanya penambahan kunjungan dari kalangan pelajar dan lainnya (masyarakat umum dan lembaga/instansi) yang cukup tinggi. Sementara itu, pada triwulan pertama tahun 2025 (Januari – Maret), tercatat

sebanyak 32 orang melakukan kunjungan dan sebagian besar merupakan mahasiswa.

Jumlah kunjungan di atas masih terbilang kecil, jika dibandingkan dengan jumlah pelajar dan mahasiswa di Jawa Tengah. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2024), jumlah pelajar di Jawa Tengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2023 berdasarkan statusnya sebanyak 1.208.304 (SMP), 452.954 (SMA), dan 790.135 (SMK). Adapun untuk jumlah mahasiswa perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jawa Tengah tercatat ada 624.991 orang mahasiswa pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024).

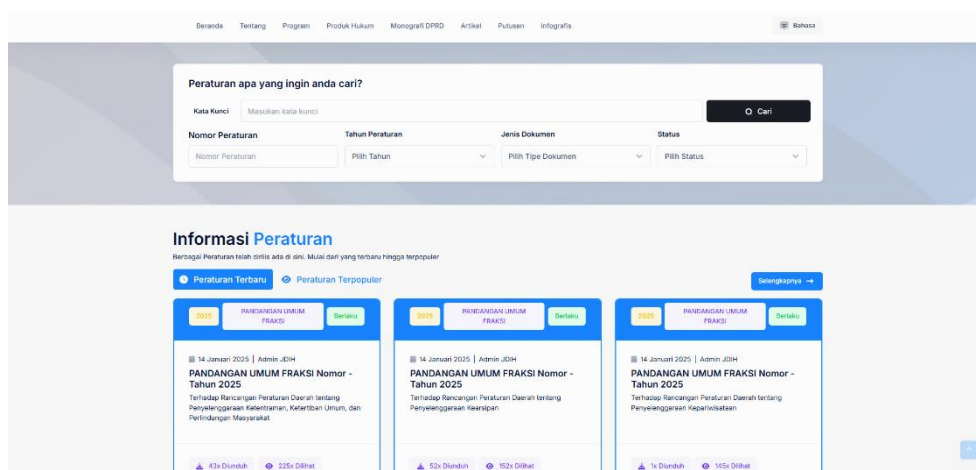


Gambar 1. 2 Leaflet JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Dalam proses penyampaian materi saat kunjungan maupun sosialisasi, JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah sampai saat ini lebih sering menggunakan media konvensional yaitu *leaflet*, brosur, dan *banner* sebagai media informasi. Materi yang dimuat dalam *leaflet*, brosur, dan *banner* berfokus pada informasi dasar mengenai pengertian, dasar

hukum, tujuan, produk hukum dan fasilitas di JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Meskipun metode ini cukup informatif, namun jangkauan dan efektivitasnya masih terbatas, terutama dalam menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas dan beragam, seperti pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang tidak secara langsung hadir dalam kegiatan tersebut.

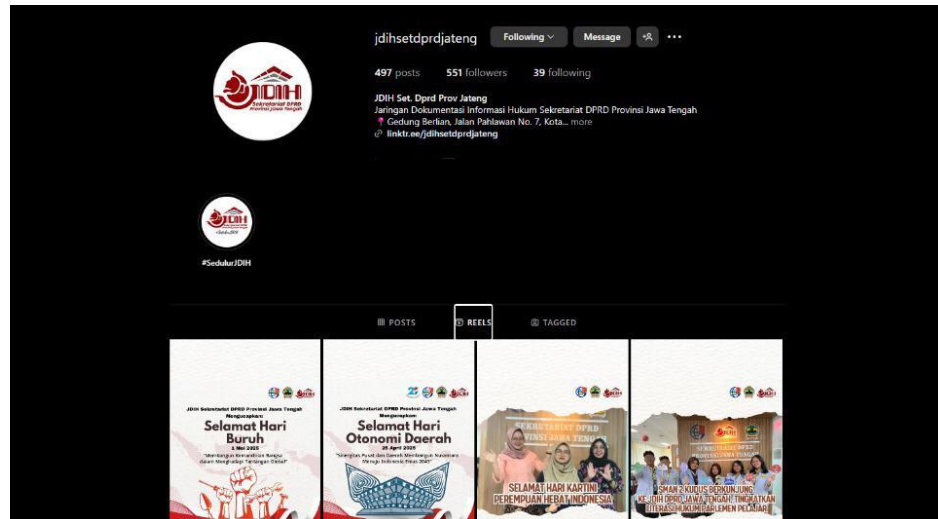
Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah juga memanfaatkan media baru (digital) seperti situs web dan media sosial (Instagram dan YouTube) dalam menyebarkan informasi hukum secara lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat.



Gambar 1. 3 Situs Web JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (<https://jdi.h.dprd.jatengprov.go.id/>)

Situs web JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (<https://jdi.h.dprd.jatengprov.go.id/>) dirancang untuk menyediakan berbagai informasi layanan terkait dokumentasi hukum dan peraturan, seperti Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, dan produk hukum lainnya secara digital. Situs web ini, telah dilengkapi dengan sistem informasi pelayanan kedewanan yaitu aplikasi e-Legislati untuk proses penyusunan peraturan daerah dan sistem informasi kearsipan daerah yang memudahkan pengelolaan arsip hukum. Selain situs web JDIH Sekretariat DPRD Provinsi

Jawa Tengah juga, tersedia berita terkini dan gambar infografis mengenai kegiatan DPRD dan informasi hukum penting lainnya.



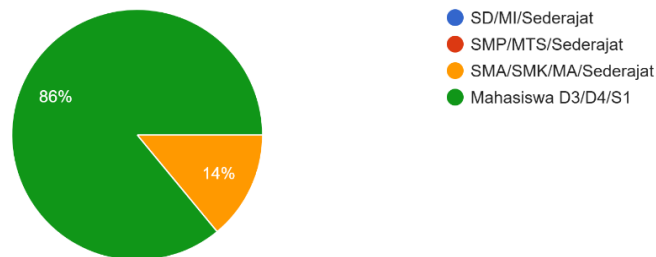
Gambar 1. 4 Media Sosial Instagram JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (@jdihsetdprdjateng)

Akun Instagram resmi JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (@jdihsetdprdjateng) digunakan untuk menyebarkan informasi hukum secara digital. Konten yang diunggah meliputi informasi produk hukum DPRD, pengumuman, promosi layanan JDIH, dan dokumentasi kegiatan serta program JDIH. Penggunaan media sosial Instagram ini juga mendorong adanya komunikasi dua arah atau interaksi dengan masyarakat. Dengan tujuan agar dapat meningkatkan keterlibatan publik, memperluas jangkauan informasi hukum, serta memastikan kebutuhan masyarakat terkait dokumentasi hukum dapat terlayani dengan baik. Namun, baik Instagram maupun situs web JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah belum menyajikan informasi yang menjelaskan secara komprehensif mengenai JDIH itu sendiri.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa, terhadap JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, penulis melakukan survei (*pretest*) dengan menyebarkan kuesioner secara daring kepada 100 responden yang

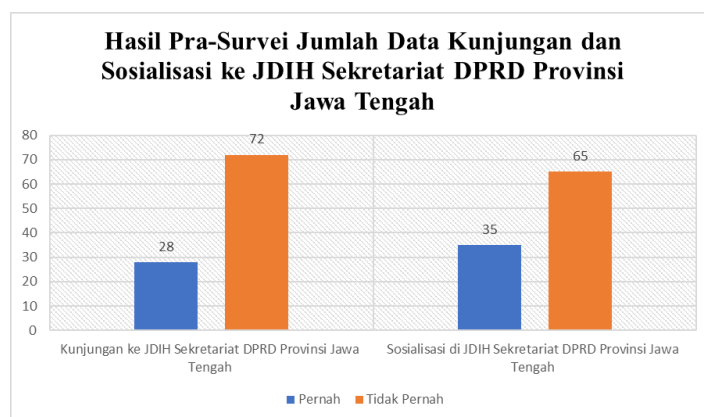
merupakan individu dengan kriteria sebagai pelajar atau mahasiswa yang berdomisili di wilayah Provinsi Jawa Tengah pada 14 – 21 April 2025.

Status pendidikan saat ini
100 jawaban



Gambar 1. 5 Hasil Pra-Survei (*Pretest*) Status Pendidikan Responden

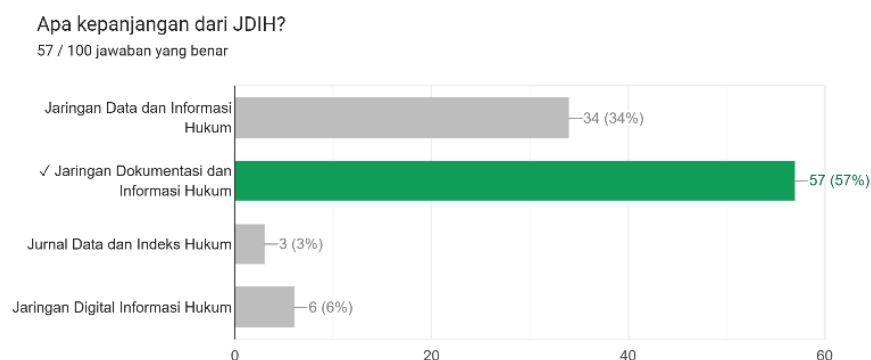
Gambar 1.5 menunjukkan hasil pra-survei (*pretest*) yang disebarakan secara online yang diisi oleh 100 responden. Mayoritas responden terdiri dari mahasiswa sebanyak 86 orang (86%), dan sedangkan 14 orang (14%) lainnya adalah pelajar tingkat SMA/SMK/MA atau sederajat. Berdasarkan sebaran wilayah, empat daerah dengan jumlah responden tertinggi adalah Kota Semarang (47%), Kabupaten Semarang (6%), Kabupaten Magelang (5%), dan Kota Surakarta (4%).



Gambar 1. 6 Hasil Pra-Survei (*Pretest*) Jumlah Data Kunjungan dan Sosialisasi ke JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Dari hasil survei (*pretest*) pada Gambar 1.6 di atas menunjukkan bahwa dari 100 responden, 72 orang (72%) belum pernah mengunjungi JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, sedangkan 28 orang (28%) sudah pernah berkunjung. Dalam hal partisipasi sosialisasi, sebanyak 65 responden (65%) belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi JDIH, sementara 35 orang (35%) menyatakan sudah pernah mengikutinya. Dapat disimpulkan, bahwa tingkat partisipasi masyarakat, khususnya pelajar mahasiswa, terhadap JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai wadah informasi hukum masih tergolong rendah dan belum menjangkau secara optimal di wilayah Jawa Tengah.

Untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat, penulis memberikan 10 butir pertanyaan pilihan ganda kepada responden. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup aspek dasar mengenai JDIH, seperti pengertian, tujuan, manfaat dasar hukum, program, serta cara mengakses informasi hukum melalui JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tujuannya untuk mengukur pemahaman responden terhadap keberadaan dan fungsi dari JDIH.

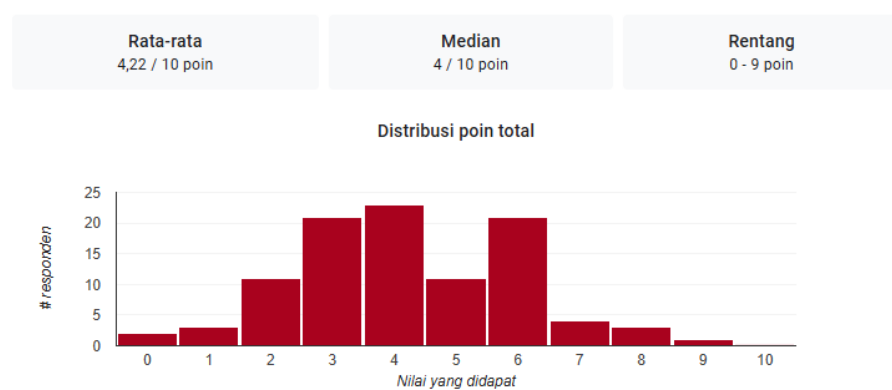


Gambar 1. 7 Hasil Kuesioner Pra-Survei (*Pretest*) Pemahaman Masyarakat Terhadap JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Hasilnya ditunjukkan pada Gambar 1.7, di mana 57% responden menjawab benar bahwa kepanjangan JDIH adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Adapun pada pertanyaan lainnya yang mayoritas

responden menjawab benar yaitu pertanyaan mengenai tujuan utama JDIH, 51% menjawab benar yaitu mengelola dan menyebarluaskan dokumen hukum. Kemudian, untuk pertanyaan manfaat adanya JDIH, 44% menjawab benar yaitu untuk memudahkan akses informasi hukum yang valid. Terakhir, pada pertanyaan tentang kelompok yang dapat mengakses JDIH Jawa Tengah, 89% menjawab benar bahwa JDIH dapat diakses oleh seluruh masyarakat umum. Data ini menunjukkan, bahwa hanya 38 dari 100 responden yang dapat menjawab benar di atas 4 pertanyaan mengenai informasi dasar JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Wawasan



Gambar 1. 8 Hasil Kuesioner Pra-Survei (*Pretest*) Pemahaman Masyarakat Terhadap JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Pada gambar 1.8 menunjukkan wawasan hasil pra-survei (*pretest*) yang telah diisi oleh 100 responden melalui Google Form. Dari 10 pertanyaan pilihan ganda, masing-masing bernilai 1 poin, rata-rata responden hanya mendapatkan skor 4,22 dari 10 poin atau menjawab benar hanya 4 dari 10 pertanyaan. Mayoritas responden memberikan jawaban keliru pada pertanyaan terkait hukum, fungsi JDIH, program JDIH, dasar hukum JDIH, cara mengakses peraturan terbaru di JDIH, dan jenis produk

hukum yang dapat diakses melalui situs web resmi JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Dari hasil pra-survei (*pretest*), dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa, tergolong rendah mengenai JDIH. Sehingga, diperlukan media *public relations* sebagai sarana informasi yang komprehensif untuk memberikan gambaran mengenai JDIH. Salah satu bentuk media *public relations* yaitu *company profile*. Menurut Kriyantono (2021) menjelaskan bahwa *company profile* merupakan produk tulisan praktisi *public relations* yang menyajikan gambaran umum suatu perusahaan atau lembaga kepada publik.

Untuk memperkuat kebutuhan JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah akan media *public relations* tersebut, penulis juga melakukan wawancara pada tanggal 27 Februari 2025 dengan Ibu Afinada Aulia Agani selaku Penata Liputan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil wawancara, Ibu Afinada Aulia Agani menyampaikan bahwa JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah “*Di JDIH sendiri belum memiliki company profile, sehingga adanya company profile ini dapat menjadi inovasi bagi JDIH dalam menyampaikan informasi untuk masyarakat.*” Pernyataan ini menegaskan bahwa *company profile* berpotensi menjadi sarana komunikasi yang inovatif dan strategis bagi JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Company profile yang dirancang secara informatif dan menarik dapat menjadi media informasi yang efektif dalam mengenalkan JDIH kepada masyarakat. Tidak hanya sebagai media informasi, *company profile* juga berfungsi sebagai media promosi yang dapat meningkatkan citra dan memperluas jangkauan komunikasi lembaga. Menurut Sunarya et al., (2023), dengan adanya *company profile* dapat memberikan gambaran mengenai profil dan pelayanan yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga

dapat membantu dalam memperkenalkan identitas perusahaan dan membantu promosikan perusahaan agar lebih dikenal oleh masyarakat.

Salah satu bentuk penyajian *company profile* adalah dalam bentuk *e-booklet*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Salwa Salsabila & Fauzi (2022), menunjukkan bahwa *e-booklet company profile* efektif dalam memberikan informasi secara lengkap dan menarik kepada publik, sehingga dapat meningkatkan daya tarik publik terhadap perusahaan. Menurut Rozi dalam Qomariah et al., (2022), penggunaan *e-booklet* mempermudah penyebaran informasi karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Selain itu, *e-booklet* juga dapat membantu sasaran pembaca untuk belajar lebih cepat, menyederhanakan penyampaian bahasa, memudahkan pencarian informasi, dan mendorong minat pembaca untuk memahami informasi lebih dalam.

Dengan demikian, *e-booklet company profile* tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga menjadi media *public relations* yang dapat memperkuat citra suatu lembaga atau perusahaan, menjangkau audiens lebih luas, serta dapat memperkenalkan program dan layanan dari suatu lembaga atau perusahaan secara efektif kepada masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. Berbagai upaya telah dilakukan oleh JDIH, seperti sosialisasi, membuka kunjungan, pengenalan melalui sosial media dan situs web resmi. Namun, berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden berusia 19-25 tahun, mayoritas dari mereka belum mengetahui keberadaan JDIH dan belum memahami fungsi JDIH secara mendalam. Kondisi ini menunjukkan bahwa informasi yang tersedia belum disampaikan secara komprehensif dan jangkauan penyebaran informasinya belum luas. Oleh karena itu, dibutuhkan media informasi yang lebih efektif dan mudah dipahami untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap JDIH.

1.3 Tujuan

Tujuan dari proyek akhir ini adalah menyajikan informasi yang komprehensif mengenai JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui pembuatan *e-booklet* interaktif. *E-booklet* interaktif ini dirancang dengan tujuan edukatif-informatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, serta memudahkan akses informasi, dan dapat memperluas jangkauan informasi secara lebih luas.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari proyek tugas akhir ini adalah meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat mengenai JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selain ini, proyek ini juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat dan pihak lainnya dalam mengenal lebih dalam mengenai JDIH. Serta, dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur dan menjadi referensi akademik, khususnya bagi pelajar dan mahasiswa di Jawa Tengah, terkait JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

1.5 Luaran

Luaran dari tugas akhir ini yakni menghasilkan *e-booklet* interaktif yang menyajikan informasi yang komprehensif mengenai JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dan akan disebarluaskan atau ditautkan melalui media sosial Instagram @jdihsetdprdjateng, sehingga dapat menjadi media informasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keberadaan dan layanan yang disediakan oleh JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.